

DILEMA DEMOKRATISASI INDONESIA SUATU PERKEMBANGAN POLITIK PASCA ORDE BARU

Syahrial Syarbaini

Fakultas Komunikasi, Universitas Esa Unggul Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
syahrialsyarbaini@yahoo.co.id

Abstrak

Demokrasi telah menjadi pilihan system politik Indonesia sejak reformasi 10 tahun yang lalu, namun perkembangan politik Indonesia telah keluar dari nilai-nilai demokrasi tersebut. Tulisan ini mencoba mengangkat dilemma demokrasi, yaitu demokrasi telah melahirkan korupsi politik, immoralitas politik telah mengaburkan nilai-nilai demokrasi dan demokrasi telah mengarah kepada oligarkhi kekuasaan dengan system feodalisme. Melemahnya civil society semakin mempersubur praktek penyimpangan demokrasi, oleh sebab itu diperlukan semangat dan kekuatan untuk mengontrol pemegang kekuasaan agar kembali kepada nilai-nilai demokrasi.

Kata Kunci: Demokratisasi, Korupsi Politik, Immoralitas Politik

Pendahuluan

Setelah jatuhnya era pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, keadaan politik dalam negeri Indonesia telah mengalami perubahan yang memberi jalan kepada proses demokratisasi di Indonesia. Pemerintahan Habibie telah mencoba membangun politik yang berdasarkan demokrasi dengan mengeluarkan berbagai kebijaksanaan, seperti perubahan beberapa undang-undang yang berdasarkan pembangunan politik demokrasi. Habibie juga telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendirikan partai, memberikan kebebasan masyarakat mengeluarkan pendapat, melakukan unjuk rasa, dan melakukan kritik terhadap pemerintah. Surat kabar pula telah dibolehkan berdiri, tidak ada lagi kekuasaan pemerintah melarangnya, dan beliau telah mendapat pujian dari kalangan wartawan sebagai tokoh peletak dasar-dasar demokrasi di Indonesia.

Demokrasi telah dipilih sebagai jalan hidup sejak reformasi. Cita-cita reformasi tahun 1998 untuk menciptakan Indonesia yang bersih kian menjauh, adanya 155 pejabat, 17 dari 33 provinsi dian-

taranya gubernur tersangka kasus hukum/korupsi (Kompas, 1/1/2011). Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 yang berintikan semangat baru bangsa menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi dan kolusi, mulai dipertanyakan keseriusannya. Skandal korupsi yang terus berkepanjangan hanya akan membuat rakyat frustrasi dan bisa menciptakan kelumpuhan demokrasi. Disamping itu proses demokrasi Indonesia juga masih banyak mengalami paradoks, masyarakat belum merasakan manfaat riil dari demokrasi, demokrasi tidak memiliki korelasi dengan kesejahteraan masyarakat, peningkatan APBN dari Rp. 300 – Rp. 400 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp. 1.100 tahun 2009, seharusnya kesejahteraan rakyat meningkat, namun hal ini tidak terjadi, rakyat miskin bertambah (Syamsul Muarif, Kompas, 16/4/10). Mobilisasi dukungan suara tanpa pendidikan politik, tidak memperkuat masyarakat sipil serta hasil demokrasi hanya dirasakan oleh kelompok elite. Sudah seharusnya praktek demokrasi di Indonesia diarahkan kepada subsidi daripada hanya bergerak pada tataran

prosedural agar Indonesia mampu menyongsong modernisasi politik yang ideal demi perwujudan visi kebangsaan pada masa depan.

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan perkembangan politik Indonesia setelah gerakan demokratisasi menjadi komitmen Indonesia di era reformasi. Dalam perjalannya demokrasi ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan, karena cukup banyak kegiatan politik Indonesia yang kurang sesuai dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi. Oleh sebab itu, kajian ini berangkat dari permasalahan, Apakah yang menjadi problema dalam perkembangan politik Indonesia sehingga tidak sesuai dengan semangat demokrasi?

Sumber pembahasan tulisan ini adalah studi kepustakaan, menyangkut pemikiran bersifat teoritis, sedangkan fakta dan opini kegiatan politik diperoleh dari informasi media massa, khususnya surat kabar. Pembahasan melalui pendekatan analisis deskriptif, mencoba menyimpulkan kesenjangan antara demokrasi secara teoritis dengan perkembangan kegiatan politik Indonesia. Aktifitas politik yang mengamati adalah terbatas pada masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kesenjangan demokrasi dalam era pemerintahan SBY yang menjadi sorotan dalam tulisan ini terbatas pada persoalan: 1) demokrasi dan korupsi politik, 2) demokrasi dan immoralitas politik dan 3) feodalisme dalam demokrasi Indonesia.

Pembahasan

Konsep Demokratisasi

Pengertian dan ciri-ciri demokrasi banyak dirumuskan oleh para penulis. Huntington (1997) menjelaskan bahwa sistem politik demokrasi bila "para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan teratur, para calon bebas bersaing dan semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Dalam pengertian klasik

(Varma.1995) demokrasi telah dipahami sebagai satu proses yang berkelanjutan, dimana hak-hak politik dan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan atas kebijakan sosial secara progresif diperluas kepada kelompok-kelompok yang tertindas, yang dikenali juga gerakan politik dari masyarakat kelas bawah untuk menentang kekuasaan kelas-kelas kaya.

Dua konsep dasar dalam demokrasi, yaitu kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat, disamping itu terkandung juga aspek prosedural demokrasi, seperti penyelesaian konflik secara damai. Pengertian kebebasan rakyat dan kekuasaan rakyat, yaitu melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik mulai proses *input* politik sampai *output* politik. Oleh sebab itu, menurut David Beetham dan Kevin Boyle (1998) keunggulan demokrasi adalah konsep kesetaraan sebagai warga negara, lebih memungkinkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat umum, mengakui pluralis dan penyelesaian masalah dengan kompromi, menjamin hak-hak asasi warga negara dan pembaharuan kehidupan sosial. Dahl (1982) juga menyebutkan jaminan kebebasan dan hak-hak dalam demokrasi, yaitu kebebasan mendirikan organisasi, kebebasan berekspresi, hak untuk mengikuti pemilu, hak mendapatkan informasi dan hak memperoleh keadilan. Pada prinsipnya demokrasi ialah: (1) kebebasan dan kekuasaan rakyat melalui pengambilan keputusan politik, (2) kesetaraan sebagai warga negara dalam memenuhi berbagai kepentingannya, (3) penyelesaian masalah secara kompromi atau dengan jalan damai, (4) pergantian pemerintahan melalui pemilihan umum yang teratur, jujur, bebas dan adil.

Dalam kehidupan demokrasi beberapa aspek kehidupan harus mendapat jaminan, yaitu: Pertama, pemerataan kepemilikan yang memberikan dasar terwujudnya pemilikan dari faktor ekonomi yang didistribusikan secara adil dan merata (Samsurizal, 1995). Kedua, kebebasan ber-

serikat, dimana individu harus memiliki kebebasan berserikat dalam pengembangan diri (Gould 1988). Ketiga, distribusi dan pemerataan jaminan sosial, dimana pemerintah harus memberikan jaminan kebutuhan hidup minimal yang memungkinkan individu hidup layak (Gould, 1988). Keempat, kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, (*developmental power*). Kelima, keamanan sosial yang meliputi: seorang individu tidak merasa khawatir tertipu oleh produk yang dibelinya, tidak merasa takut atas pemeriksaan polisi, tidak merasa khawatir diperhentikan dalam pekerjaannya dengan sebab yang tidak penting dan rasa aman lain-lain (Samsurizal, 1995).

Tujuan demokratisasi adalah menegakkan semakin banyak nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik Maswadi Rauf (1998) mencoba memberikan pengertian tentang “demokratisasi”, yaitu sebuah proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokrasi dapat dibentuk secara bertahap. Oleh sebab itu, ciri-ciri demokratisasi menurut Maswadi Rauf (1998) adalah: (1) proses yang tidak pernah selesai, (2) implemmentasi secara bertahap dan bersifat evolusioner, (3) satu perubahan sosial secara persuasif.

Di negara-negara baru dan sedang berkembang, perkembangan demokrasi dalam keadaan terhenti-henti, menurut ciri-ciri yang dikemukakan oleh Huntington (1968) bahwa negara-negara itu dikenali sebagai penganut sistem politik tradisional, yang dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu: negara feodal dan birokrasi dengan kekuasaan secara sentral. Berdasarkan pendapat ini peluang perkembangan demokrasi sangat kecil sekali.

Di antara faktor penghambat perkembangan demokrasi menurut Dennoek (1979) yaitu: faktor historis dari peninggalan kolonial, tatanan sosial ekonomi dan budaya politik yang keterbelakang. Oleh se-

bab itu, diperlukan kondisi otonomi dan menghargai orang lain, percaya terhadap hak-hak individu, toleransi dan kompromi, suka membaca dan berpendidikan, semangat kebangsaan, kesepakatan bersama, dan berkelompok. Menurut Wiarda (1991), demokrasi tidak dapat kekal apabila keterbelakangan sosial ekonomi yang sangat jauh, budaya politik yang tak sesuai demokrasi seperti budaya feodal, institusi politik yang lemah, pegawai militer yang kuat dalam politik dan institusi-institusi masyarakat umum yang lemah.

Ukuran-ukuran tingkah laku keberhasilan proses demokratisasi di negara-negara berkembang agak sulit, perlu diperhatikan bahwa tidak hanya cita-cita yang penting, yang lebih penting lagi ialah tugas apa yang harus dikerjakan untuk mencapai perkembangan demokrasi yang luas. Tugas-tugas itu mengikut Pye (1982) ialah masalah kepemimpinan, pembangunan suatu masyarakat warga negara (*civil society*) yang menyadari bahwa hubungan mereka dengan pemerintah yang bersifat “input” iaitu usaha-usaha, pengorbanan, kesetiaan mereka dan menerima pelayanan dan “output” atau buah dari kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sulitnya berfungsi demokrasi politik di negara berkembang disebabkan oleh faktor-faktor (Schoorl 1982) yaitu: (i) perkembangan ekonomi sebagai syarat mutlak untuk demokrasi dengan indikatornya ialah kesejahteraan, industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan. (ii) pentingnya semangat pluralis bersama semangat per satuan dan rasa kebangsaan. (iii) prosedur pengambilan keputusan secara demokrasi (Barat) sulit menempat tempat, karena oposisi dianggap sebagai tindakan permusuhan, perbedaan pendapat tidak dinyatakan dengan tegas, kalah dalam pengambilan keputusan dapat dianggap kehilangan muka (malu) dan sebagainya. (iv) kurang berlatih dalam menggunakan institusi-institusi demokrasi, (v) mobilisasi massa dan masalah harapan yang

dibangkitkan, artinya bahwa setelah berhasil memperoleh jabatan, tidak berhasil memenuhi harapan-harapan yang dijanjikan. (vi) keya kinan akan faham tradisional yang menganggap bahwa pemimpin itu memiliki kharisma, (vii) terbatasnya alternatif lapangan kerja, (viii) berkembangnya korupsi karena kekuatan sentral yang lebih kuat. Transisi demokrasi adalah menggalakkan kepemimpinan dalam budaya demokratik dan pembangunan masyarakat atau warga negara (*civil society*) akan perlunya menyadari kaitannya dengan proses politik.

Demokrasi dan Korupsi Politik

Perkembangan demokrasi Indonesia memperlihatkan penyimpangan apabila melihat pemilihan umum legislatif dan presiden di era reformasi boleh dikatakan pemilihan umum terlama dan termahal. Pelaksanaan Pilkada berlangsung hampir setiap minggu, mahal biaya membuat beberapa kabupaten/kota terancam defisit anggaran, apalagi banyak terjadi pelanggaran sehingga pemilihan umum kepala daerah (pilkada) diulang kembali. Pemantauan ICW menemukan adanya modus-modus penggunaan APBD untuk kemenangan pilkada, misalnya penggunaan program-program populis dalam bentuk alokasi dana bantuan langsung tunai, program kesehatan gratis, sembako murah, beras untuk masyarakat miskin, bantuan sosial dan sebagainya (Hasibuan, 2010).

Sistem Pilkada langsung masih identik dengan *money politic*. Sekalipun sistem Pilkada langsung sebagai salah satu instrument demokrasi yang mempersilakan siapapun untuk maju sebagai pemimpin daerah, ternyata dalam pelaksanaannya tidak mudah dan membutuhkan dana besar yang berujung pada pemimpin daerah memungkinkan melakukan tindakan korupsi demi mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Mahalnya dana politik dalam pilkada tidak sebanding dengan gaji

kepala daerah, misalnya untuk calon gubernur diperlukan biaya Rp. 20 – Rp. 100 milyar, padahal gaji gubernur per-tahun berkisar Rp. 510 – Rp. 600 juta, calon bupati/wali kota diperlukan biaya pilkada Rp. 0,3 – Rp. 10 milyar, sedangkan gaji yang diperoleh hanya Rp. 300 – Rp. 420 juta/tahun (Hasibuan: 2010)

Ketika uang yang berperan, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan, suara rakyat bisa dibeli dan dimanipulasi, idealisme pemilih dan otoritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi hancur, maka yang berpengaruh adalah kepentingan investor akan mendikte kebijakan politik, kondisi inilah yang menurut Yudi Latif disebut sebagai korupsi politik (Kompas, 2/2/2010).

Fenomena institusi penegak hukum sudah terjadi dalam politik Indonesia, seperti muncul kasus “mafia hukum”. Munculnya konflik antar kubu pada lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian yang terjerat pada makelar kasus. Dalam kondisi institusi demokrasi yang lemah atau rapuh membuka peluang penetrasi rasionalitas sosial budaya, penegakan hukum dan keadilan berujung ke pada kegagalan demokrasi dan kehancuran bangsa. Krisis kenegaraan telah membayangi Indonesia dengan berbagai isu kriminalisasi dan pelemahan KPK, mega skandal Bank Century, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta rendahnya daya saing dalam ancaman perdagangan bebas. Kegagalan kepemimpinan nasional untuk memperbaiki kinerja demokrasi dapat mengarah kepada proses delegitimasi demokrasi dan delegitimasi kepemimpinan nasional yang dipilih melalui prosedur demokrasi.

Berdasarkan kenyataan di atas, demokrasi di Indonesia belum menuju ke arah apa yang dikemukakan oleh ahli politik Huntington, seperti Pilkada dimana para pembuat keputusan kolektif yang paling

kuat dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan teratur, para calon bebas bersaing dan semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Sebagaimana dikatakan oleh David Beetham dan Kevin Boyle, bahwa keunggulan demokrasi adalah konsep kesetaraan sebagai warga negara, lebih memungkinkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat umum, menjamin hak-hak asasi warga negara dan pembaharuan kehidupan sosial. Juga pendapat yang dikemukakan oleh Dahl, seperti kesetaraan sebagai warga negara dalam memenuhi berbagai kepentingannya, pergantian pemerintahan melalui pemilihan umum yang teratur, jujur, bebas dan adil.

Oleh sebab itu, membangun demokrasi Indonesia ke depan perlu meninjau kembali prosedural demokrasi yang berdampak kepada melemahnya kekuatan bangsa menuju kearah substansi demokrasi yang efisien, rasional dan berkeadilan.

Demokrasi dan Immoralitas Politik

Elite-elite politik abad informasi menemukan ruang kebebasannya tetapi tidak berhasil membangun demokrasi itu sendiri, mereka tidak mampu membangun tindak komunikasi politik efektif dengan warga sehingga tidak mampu memproduksi pengetahuan yang diperlukan bagi pencerdasan warga. Komunikasi politik kini tidak diganggu lagi oleh tekanan, represi dan kekerasan simbolik sebagaimana pada rejim otoriter. Namun, kebebasan yang diperoleh elite politik tidak disertai oleh pengetahuan, intelektualitas dan *virtue* akan menciptakan immoralitas politik (*political immorality*) yang mendeonstruksi nilai-nilai moral politik. Peralihan dari geopolitik kearah politik jejaring (*neto-politics*) telah mengubah watak demokrasi kearah transparan ekstrim (*extreme transparency*). Menurut Piliang (2010) demokrasi ekstrim memungkinkan keterbukaan tanpa batas (penelanjangan) apapun sehingga tidak ada lagi yang dapat

dirahasiakan, inilah demokrasi abad kuantum.

Dalam demokrasi abad kuantum, para pencari perhatian (*attentionalist*), yaitu elite-elite yang berupaya mencari sanjungan publik melalui seduksi media, sehingga berpotensi kearah kondisi desubstansi demokrasi (*democratic desubstantiality*). Ruang politik tidak dibangun oleh imajinasi dan ideal-ideal politik, tetapi oleh imajinasi-imajinasi populer (*popular imagination*) yang menghadirkan tontonan banalitas politik.

Arsitektur demokrasi yang dibangun diatas hegemoni media menciptakan distorsi tujuan masyarakat demokratis, karena pengetahuan, gagasan, strategi dan tindakan politik dibangun dalam skema logika media. Masyarakat demokratis yang mempunyai rasionalitas sendiri untuk mencapai tujuan dan ideal-ideal kolektif sudah terinfiltrasi oleh rasionalitas media yang mengiring mereka kepada tujuan-tujuan yang bias dan distortif.

Pilar-pilar penyangga arsitektur demokrasi sudah makin kropos oleh elite-elite politik sendiri. Simbolis antara mesin politik dengan mesin media yang semula diharapkan dapat memperkokoh bangunan demokrasi, namun justru menjadi perusak nilai-nilai luhur dari demokrasi itu sendiri. Para elite justru disibukkan oleh hasrat publisitas, popularitas dan selebriti sehingga melupakan tanggung jawab politik.

Fenomena lain yang sangat menguik etika demokrasi dan hukum adalah se orang terdakwa korupsi dilantik menjadi kepala daerah, seperti Jefferson Soleiman yang dilantik menjadi walikota Tomohon 7 Januari 2011, Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono dilantik 29 November 2010, Bupati Rembang, Moch Salim dilantik 20 Juli 2010. Disamping itu selama Pilkada digelar tahun 2010, 75% dari 227 telah terjadi pelanggaran yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi, menurut Badan Pengawas Pemilihan

Umum telah terjadi sebanyak 1.767 pelanggaran (Kompas, 29/12/10)

Demokrasi Indonesia telah mengaburkan makna sesungguhnya fakta politik tidak mencerminkan aspirasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat, sebagaimana dikatakan oleh Gould, bahwa, demokrasi memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi (*developmental power*) yang dimiliki oleh setiap warga negara. Juga apa yang dikatakan oleh Maswadi Rauh bahwa tujuan demokratisasi adalah menegakkan semakin banyak nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik, yaitu sebuah proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokrasi dapat dibentuk secara bertahap. Apa yang terjadi dalam perkembangan politik demokrasi Indonesia justru semakin mengaburkan nilai-nilai tersebut.

Feodalisme Dalam Demokrasi Indonesia

Hasrat dan semangat berkuasa di alam demokrasi adalah suatu kewajaran karena setiap orang mempunyai hak yang sama. Namun, runyamnya, jalur pertalian darah atau keluarga merupakan ciri masyarakat tradisional justru tersemayam subur dalam demokrasi yang terus tumbuh di Indonesia. Sejak Pemilu di gelar pasca era otonomi daerah 10 tahun silam, politik dinasti atau rejim keluarga semakin fenomenal. Pilkada melahirkan oligarkhi daerah dengan aktornya suami, istri, orang tua – anak atau kakak – adik. Kasus Sri Suryawidati (istri Bupati Bantul), Idham Samawi – Titik (istri Bupati Sukoharjo), Bambang Riyanto – Widya Kandi Susanti (istri Bupati Kendal), Anna Sophana – Daniel Mutaqien (istri – anak Bupati Indramayu) dan beberapa kasus yang sama terjadi di pilkada Kediri, Kutai Kartanegara, Jembrana Bali dan lain-lain (Subhan, 2010).

Fenomena rezim keluarga tidak berbeda dengan fenomena feodalisme pada silam yang membuat penyaluran aspi-

rasi rakyat menjadi semu. Hal ini menunjukkan demokrasi belum menampak wujud sesungguhnya sepeninggal Orde Baru yang otoritarian. Pada masa Orde Baru dinasti keluarga menguasai ekonomi, namun sekarang memasuki ranah politik sehingga kualitas demokrasi menurun.

Penelitian Harry J. Benda yang dikutip oleh Dwipayana (2011) berkeyakinan bahwa Indonesia tidak akan pernah beranjak menjadi negara yang demokratis, karena kultur politik yang dibangun para elite-elitenya semata-mata melanjutkan tradisi politik feodal yang diwarisi di masa lalu (kerajaan). Walaupun era reformasi telah bergulir, dimana liberalisasi politik tidak hanya memungkinkan pengenalan instalasi kelembagaan baru demokrasi yang membuka ruang politik semakin bebas dan kompetitif sehingga tertutup pintu bagi politik feodalis. Namun, kenyataannya kehadiran politik patronase dalam bentuk politik neo-feodalisme semakin menampakan dirinya, seperti gejala putra mahkota, seperti pada pencalonan Ani Yudhoyono, Puan Maharani menjadi kandidat Presiden/wakilPresiden oleh elite partai demokrat (Dwipayana, 2011).

Dalam tradisi feodalisme, kekuasaan merupakan suatu yang biasa diwariskan kepada penerus di lingkungan terdekat sang patron, restu atau legitimasi sang patron sangat penting. Regenerasi politik berlangsung dalam lingkaran keluarga kecil, seperti istri, anak dan menantu, sehingga keluarga inti selalu dididik atau mengetahui logika dasar permainan politik. Para elite-elite aktor politik utama selalu menghembus-hembuskan mitos bahwa pewaris memiliki kualitas yang sama dengan figur yang diwarisinya. Maka sudah selayaknya untuk kultur demokrasi yang sesungguhnya dimana proses demokratisasi harus memungkinkan transformasi dari kultur « kawula » atau klien menjadi kultur warga negara. Demokratisasi harus dimaknai sebagai trans-

formasi budaya untuk melawan nilai-nilai feodalisme.

Demokrasi menjamin hak setiap orang untuk maju dalam Pilkada, tetapi tidak melanggar hak publik dalam mencari fugur yang ideal. Keterbukaan warga masyarakat secara bebas untuk mencari seorang pemimpin publik yang berkualitas, kapasitas, kapabilitas, integritas dan moralitas adalah prinsip utama dari demokrasi. Hal ini sesuai dengan peran pendiri demokrasi, Montesquieu (1689-1755) dengan ajaran Trias Politika-nya yang bertujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu pihak. Pilar utama demokrasi adalah terwujudnya masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil adalah masyarakat yang bebas dari ketergantungan pada negara dan pasar, percaya diri, mandiri, suka-rela, serta taat kepada nilai-nilai dan norma-norma dalam negara hukum.

Masyarakat sipil yang berfungsi baik justru menjadi penyeimbang arogansi pejabat negara dengan mengajukan pertanyaan kritis atas jalannya kebijakan publik. Masyarakat sipil mampu merajut ke percaya-an dan tanggung jawab sosial yang memungkinkan masyarakat berfungsi lebih efektif. Ia menjadi modal sosial yang ikut mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang pro-kesejahteraan umum.

Kesimpulan

Demokrasi yang menjadi pilihan utama sebagai sistem politik Indonesia semenjak reformasi telah mengalami distorsi nilai-nilai. Beberapa dilema yang ditemukan dalam kegiatan politik Indonesia, fenomena *money politic* telah meracuni demokratisasi, khususnya pada momentum pemilihan umum daerah (pilkada), terbuka ruang bagi elite-elite politik melakukan korupsi, manfaat demokrasi untuk kesejahteraan rakyat kurang dirasakan. Perkembangan teknologi media telah dimanfaatkan oleh elite-elite politik untuk membangun citra populer dengan menutupi immoralitas yang mengelilinginya, sehingga warga

negara mengalami kesulitan menemukan kepemimpinan yang berkulitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas yang dituntut dalam demokrasi. Apabila elite-elite politik oligarkhi telah memegang tampuk kekuasaan semakin tertutup bagi rakyat untuk memilih alternatif pemimpin sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, maka yang muncul adalah fenomena tradisi politik feodalis dimana para elite-elite mencoba menghembuskan putra mahkota dilingkaran biologis figur.

Demokrasi perlu di bangun agar nilai-nilai positifnya membumi dalam perkembangan politik di Indonesia, langkah-langkah yang dapat diperjuangkan adalah : 1) perlunya kontrol secara terus menerus terhadap pemegang kekuasaan, baik di pemerintahan pusat maupun pada tingkat daerah melalui gerakan pemikiran yang cerdas dari para kalangan intelektual, baik di kampus maupun diluar kampus. 2) Suara-suara yang menjadi isu dalam masyarakat dapat dikomunikasikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat dan agama kepada pemerintah agar penyimpangan yang terjadi tidak terlalu jauh dari nilai-nilai demokrasi. 3) Perlunya pencerdasan rakyat melalui pendidikan politik oleh para tokoh masyarakat diluar pemerintah, khususnya sosialisasi nilai-nilai demokrasi dalam mementum pilkada dan pemilu legislatif dan presiden. 4) Peran media massa secara independen untuk menyuarakan suara rakyat sekaligus memberikan informasi yang objektif terkait dengan proses demokrasi, penegakan hukum dan keadilan masyarakat.

Demokratisasi yang dapat memperkuat tumbuhnya masyarakat madani (civil society) dapat menciptakan sistem politik Indonesia yang modern beradab dan bermartabat.

Daftar Pustaka

Asy'ari, Hasyim, "Ironi Demokrasi", *Kompas*, 11 Januari 2001.

- Beetham, David & Boyle, Kevin, “Demokrasi”, Kanisius, Jakarta 1998.
- Dahl, Robert, “*Dilemmas of Pluralist democracy: Autonomy vs Control*”, Yale University Press, New Haven, 1982.
- Dwipayana, AA GN Ari, “Neofeodalisme Demokrasi”, *Kompas*, 19 Jan 2001.
- Gould, Caral C, “*Rethinking democracy : Freedom and social cooperation in politics, economy and society*”, Bambridge University, New York Press, 1998.
- Huntington, Samuel P, “Political development and political decay”, *World Politics*, 17(3): 291-403, 1968.
- Huntington, Samuel P, “*Gelombang Demokratisasi Ketiga*”, Grafiti, Jakarta, 1997.
- Hasibuan, Muhammad Umar Syadat, “Sisi gelap Pemilukada”, *Republika*, 24 Nov, 2010.
- Kompas, “Pelaksanaan Demokrasi” – Paradoks, 2010.
- Latif, Yudi, “Korupsi Demokrasi”, *Kompas*, 2 Feb 2010.
- Maswadi Rauf, “*Demokrasi dan demokratisasi: peninjauan teoritis untuk Indonesia*”, Mizan – Laboratorium Ilmu Politik FISIP-UI, Jakarta, 1998.
- Muarif, Syamsul, “Restorasi Demokrasi”, Jakarta, *Kompas*, 5 Maret 2010.
- Pennock, J Roland, “*Democratic political theory*”, Princeton : Princeton University Press, 1979.
- Pye, Lucian W, “The concept of political development”, Dlm, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 48 (2): 77-89, 1982.
- Samsul Rizal Panggabean, “Nilai dan Kriteria Proses Demokrasi”, Dlm, Riza Noer Arfani, (pnyt), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, hlm, 32-55, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Schoorl, J,W, “*Modernisasi*”, Terj, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Subhan SD, “Politik Dinasti Feodalisme di Lorong Demokrasi”, *Kompas*, 31 Mei, 2010.
- Wiarda, Howard J, “The Democratic Breakthrough in Latin America”: Challenges Prospects and U,S, Policy, Dlm, *SAIS Review*, Summer – fall, : 21-34, 1991.
- Varma, S,P, “*Teori politik modern*”, Rajawali Press, Jakarta, 1995